
Analisis Eskalasi Konflik Siprus Berdasarkan Manajemen Konflik Ho-Won Jeong

*Nurul Hichmah*¹, *Darel Farros Kurniawan*², *Prilla Marsingga*³

Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2110631260010@student.unsika.ac.id, 2110631260019@student.unsika.ac.id
prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

Abstract: *This research utilizes Ho-Won Jeong's conflict management theory to analyze the conflict in Cyprus, focusing on identity and power as key factors. The conflict between Greek and Turkish ethnicities in Cyprus requires a comprehensive approach to understand and manage it. Previous research also highlights the role of NGOs and the UN in conflict resolution efforts in Cyprus. The research method used is qualitative with a library research approach. This study is expected to contribute to a deeper understanding of the conflict in Cyprus and to design effective conflict management strategies.*

Keywords: *Identity, Conflict Management, Power, Qualitative Research, Peace and Conflict Studies*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik Ho-Won Jeong untuk menganalisis konflik di Siprus, dengan fokus pada identitas dan kekuasaan sebagai faktor utama. Konflik di Siprus antara etnis Yunani dan Turki memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami dan mengelola konflik tersebut. Penelitian sebelumnya juga menyoroti peran LSM dan PBB dalam upaya penyelesaian konflik di Siprus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang konflik di Siprus dan merancang strategi manajemen konflik yang efektif.

Kata Kunci: Identitas, Manajemen Konflik, Kekuasaan, Penelitian Kualitatif, Studi Perdamaian dan Konflik

PENDAHULUAN

Berawal pada tahun 1955 dimana Organisasi Nasional Siprus Yunani (EOKA) melancarkan sebuah pemberontakan melawan pemerintah kolonial Britania Raya (Inggris). EOKA, yang dipimpin oleh George Grivas, mempunyai tujuan untuk mencapai

sebuah penyatuan Siprus dengan Yunani, yang dikenal sebagai "enosis." Pemberontakan ini merupakan bentuk pembalasan terhadap ketidakpuasan mengenai pemerintahan kolonial Britania Raya pada saat itu dan merupakan desakan untuk menyatakan kemerdekaan serta penyatuan dengan Yunani. Selama periode pemberontakan tersebut, terjadi serangkaian tindakan

terorisme, sabotase, dan konfrontasi antara EOKA dan pasukan keamanan Inggris. Puncaknya adalah penangkapan dan pengadilan beberapa anggota EOKA, termasuk Grivas. Pada tahun 1959, situasi mencapai titik jenuh, dan Inggris, Yunani, dan Turki sepakat untuk mulai mengupayakan penyelesaian secara damai.

Kemudian, pada tahun 1960, Siprus akhirnya memperoleh kemerdekaan melalui Kesepakatan Zurich-London. Kesepakatan ini melibatkan Inggris, Yunani, dan Turki, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah negara federal yang independen. Kesepakatan ini menetapkan kerangka kerja untuk Siprus sebagai negara federal yang terdiri dari 2 komunitas utama, yaitu komunitas Yunani dan Turki. Menurut kesepakatan ini, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dibagi antara komunitas Yunani dan Turki. Kesepakatan tersebut juga menyediakan hak veto bagi kedua komunitas dalam keputusan-keputusan penting. Meskipun awalnya diharapkan untuk menciptakan stabilitas, implementasinya terbukti sangat rumit dan diikuti oleh ketidaksetujuan dan ketegangan antara kedua komunitas yang pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik/perpecahan.

RoC (*Republic of Cyprus*) yang berdiri tepat pada tahun 1960, merupakan negara pulau yang sebelumnya pernah dikuasai oleh Inggris selama 8 dekade, dan sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman selama 3 abad. Pada tahun 1950-an, warga Siprus Yunani yang telah lama mendukung persatuan dengan negara Yunani mulai bangkit untuk mengusir kekuasaan Inggris secara paksa. Sebagai respon, sejumlah warga Siprus Turki yang tidak terima, ikut bergabung dengan Inggris untuk menjadi polisi tambahan dalam membantu melawan paramiliter Siprus Yunani. Ketika Siprus Yunani melakukan

pembalasan terhadap komunitas tersebut, Siprus Turki mengorganisir unit paramiliter mereka sendiri. Sehingga, sampai akhir dekade ini, kedua komunitas itu masih berjuang demi masa depan pulau tersebut.

Pembentukan dari RoC sendiri dimaksudkan sebagai kompromi antara 2 visi yang berbeda di antara populasi utama dalam pulau tersebut – atau, setidaknya, mayoritas dari mereka. Preferensi masyarakat Siprus Yunani (*Greek Cypriots*) terhadap penyatuan pulau tersebut dengan Yunani (*enosis*) bertentangan dengan keinginan masyarakat Siprus Turki (*Turkish Cypriots*) untuk memisahkan pulau tersebut (*taksim*), karena komunitas mereka berada di bawah perlindungan oleh negara Turki. Konstitusi RoC, yang dinegosiasikan oleh Türkiye (Turki saat ini), Yunani dan Inggris, dengan partisipasi perwakilan Siprus Yunani dan Siprus Turki, secara eksplisit mengesampingkan tentang *enosis* dan *taksim*. Sebaliknya, mereka membentuk negara bikomunal dengan perwakilan yang berbasis kuota dan pembagian kekuasaan antara 2 komunitas konstituen yang dominan.

Tidak butuh waktu yang lama bagi ketegangan untuk mulai memuncak. Pada bulan November 1963, ketika masyarakat Siprus Yunani menyalahkan perwakilan Siprus Turki yang dianggap telah berlebih (*overrepresentation*) atas terjadinya hambatan dalam kebijakan, presiden Republik Siprus Yunani, Uskup Agung Makarios III, mengusulkan serangkaian amandemen konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan negara yang lebih bersatu dibandingkan dengan negara secara bikomunal yang terbagi secara etnis. 3 minggu kemudian, kekerasan antarkomunitas akhirnya pecah di ibu kota Nicosia. Anggota parlemen Siprus Turki dan pegawai negeri sipil mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan keamanan. Dengan tidak adanya pejabat dari

komunitas Siprus Turki yang tersisa di pemerintahan, mayoritas Siprus Yunani mengambil kesempatan ini dan mendapat kendali penuh atas RoC yang sudah diakui secara internasional.

Ankara telah menghentikan semua kontak dengan apa yang sampai hari ini disebut sebagai “Pemerintahan Siprus Yunani” (*The Greek Cypriot Administration*). Posisinya saat ini adalah bahwa “Republik Siprus, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional, tidak ada lagi” pada bulan Desember 1963. Walaupun pasukan penjaga perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah dikerahkan pada bulan Maret 1964, kekerasan antarkomunitas tetap berlanjut sampai akhir tahun 1967. Penculikan, eksekusi, dan pelecehan seksual pada saat itu telah memaksa warga Siprus Turki untuk meninggalkan rumah mereka di seluruh pulau, dan mengkonsentrasikan masyarakatnya di daerah-daerah “kantong” (*enclaves*) yang hanya mencakup 3% wilayah.

Keadaan berubah menjadi lebih buruk tepatnya pada tahun 1974, ketika kelompok paramiliter Siprus Yunani, yang didukung oleh junta yang saat itu sedang berkuasa di Athena, melakukan kudeta terhadap pemerintah Siprus. Türkiye membalasnya dengan melakukan intervensi menggunakan kekerasan, seolah-olah untuk melindungi warga Siprus Turki. Pasukan Turki mengusir warga Siprus Yunani dari sepertiga bagian utara pulau tersebut melalui kampanye penggusuran, penjarahan, penahanan, eksekusi, dan kekerasan seksual. Pada akhirnya, ibu kota dan pulau tersebut, secara *de facto* menjadi terpecah, seperti yang terjadi sampai sekarang, dengan pemerintahan yang terpisah di utara dan selatan.

Dalam prosesnya, pasukan Turki berhasil merebut resor pantai Varosha/Maraş di sepanjang Pantai Famagusta/Gazimağusa. Melihat pusat

ekonomi yang sebelumnya ramai disitu, muncul rencana untuk menjadikan daerah tersebut sebagai alat tawar-menawar dalam penyelesaian di masa yang akan datang, sehingga Ankara dan Siprus Turki telah menjadikan wilayah tersebut sebagai kota hantu yang dipagari (*fenced-off ghost town*).

Beberapa dekade selanjutnya setelah terjadinya invasi, para pemimpin Turki dan Siprus Yunani memulai pembicaraan di bawah naungan PBB, yang bertujuan untuk membentuk federasi bizonal dan bikomunal. Negosiasi ini membayangkan 2 komunitas yang setara menjadi bagian dari satu identitas untuk tujuan kebijakan luar negeri. Sementara itu, Ankara berupaya mendukung Siprus Turki dengan dukungan ekonomi dan politik. Namun, prospek reunifikasi mengalami kendala ketika, pada bulan November 1983, majelis legislatif *de facto* Negara Federasi Turki Siprus menyetujui pembentukan “Republik Turki Siprus Utara” (*Turkish Republic of Northern Cyprus*) (“TRNC”) dan deklarasi kemerdekaannya. Sejak itu, warga Siprus Turki dan Türkiye umumnya menggunakan nama “TRNC” untuk merujuk pada entitas yang dijalankan oleh pemerintahan Siprus Turki.

Tindakan Siprus Turki tersebut mendapat kecaman keras di Dewan Keamanan PBB. Hanya Türkiye yang mengakui entitas baru itu, meskipun mereka tidak secara resmi mendukung pemisahan tersebut, seperti yang terjadi antara tahun 1955 dan 1960. Sementara banyak kelompok garis keras Turki dan Siprus Turki yang terus mendukung pemisahan secara penuh hingga pada tahun 2002, setidaknya secara diam-diam, dan Ankara terus mengerahkan kekuatan militernya dalam “TRNC”, kebijakan resmi dari semua pihak secara konsisten menyerukan negosiasi untuk menyatukan kembali pulau tersebut. Sejalan dengan itu, Siprus Turki melanjutkan pembicaraan dengan Siprus

Yunani untuk membentuk negara federal.

Demi kepentingan mereka sendiri, dan demi kepentingan untuk mencapai stabilitas regional, Siprus perlu keluar dari situasi yang sulit dan bertele-tele ini. Sebagai pengakuan atas kenyataan yang terjadi, dan mungkin khususnya sebagai respons terhadap pergerakan ke utara di Varosha/Maraş, pada bulan Mei 2022 kepemimpinan Siprus Yunani secara resmi mengusulkan paket langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, termasuk langkah-langkah untuk membangun hubungan warga Siprus Turki dengan negara lain. Pemerintahan Siprus Turki menolak usulan tersebut, menyebutnya sebagai upaya untuk “menyebarkan kekuatan pihak Siprus Yunani ke seluruh pulau”. Namun, banyak hal spesifik yang layak untuk ditinjau kembali, dan dapat dicapai, terutama jika warga Siprus Turki memperjelas niat mereka untuk mengembalikan Varosha/Maraş sebagai bagian dari kesepakatan di masa depan.

Konflik Siprus yang telah berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan kompleksitas dinamika antara komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki di pulau tersebut. Dalam konteks penerapan Analisis Manajemen Konflik Ho-Won Jeong, terdapat kebutuhan untuk memahami peran variabel tertentu yang mungkin memengaruhi eskalasi konflik. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini mencakup; Sejauh mana teori dan hasil penelitian dalam literatur (berdasarkan buku "*Conflict Management and Resolution: An Introduction*" oleh Ho-Won Jeong) dapat diterapkan untuk memahami dan mereduksi konflik di Siprus?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis dinamika konflik di Siprus dengan menerapkan kerangka konsep Analisis Manajemen Konflik Ho-Won Jeong.

Dengan merumuskan tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi konflik Siprus dan memberikan dasar untuk merancang strategi manajemen konflik yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama berjudul *Analysis of the Ethnic Conflict in Cyprus during the Rule of Democrat Party* oleh Meral Balci. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi unsur-unsur yang hilang dari resolusi kondlik dengan membuat analisis terhadap solusi yang disarankan oleh pemerintah Turki untuk konflik Siprus. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konflik antara etnis Yunani Siprus yang bersikeras untuk menentukan nasibnya sendiri agar Siprus bergabung dengan negara Yunani sementara etnis Turki Siprus diabaikan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Penelitian ini menyoroti resolusi dari pemerintah Partai Demokrat Turki yang tidak mampu mewakili sikap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Siprus Turki, hal ini telah mengecewakan masyarakat Siprus Turki karena telah lama menafsirkan masalah ini sebagai "Masalah Internal Inggris". Penulis menggunakan teori kebutuhan dan kepentingan yang dikembangkan melalui pendekatan struktural dalam penelitian ini yang hasilnya menunjukkan hasil analisis elemen yang hilang dalam tinjauan penulis pada solusi pemerintah Turki dalam konflik Siprus. Penelitian kedua berjudul *Upaya Ingo (International Non-Governmental Organization) Dalam Aktifitas Peacebuilding Di Siprus Tahun 2008-2014* oleh Muhammad Zikron. Penelitian ini menyoroti peran NGO *Peaceplayers* Internasional dalam aktivitas *peacebuilding* di negara Siprus. Penulis menggunakan teori *two-track diplomacy*

dalam menganalisis peran NGO. *Two-track diplomacy* atau diplomasi dua jalur merupakan salah satu upaya aktor negara (*non-state actor*) untuk menciptakan saluran dan komunikasi informal yang bertujuan menjalin kontak antar pihak yang berkonflik. Penelitian ini juga menggunakan sudut pandang peacebuilding sebagai analisis utama yang menunjukkan hasil bahwa kegiatan peacebuilding merupakan level terakhir yang dapat dilakukan di Siprus mengingat kondisi disana dikategorikan kedalam perdamaian negatif yakni kondisi konflik yang belum terselesaikan dengan ketiadaan perang. Penelitian selanjutnya berjudul *United Nations Force in Cyprus: success or failure? The comparison of conflict Management and conflict Resolution perspectives* oleh Neda Smiljanic. Penelitian ini menjelaskan mengenai peran PBB dalam menengahi konflik Siprus. Penulis menggunakan komparasi antara manajemen konflik dan resolusi konflik pada peran PBB dalam konflik Siprus. Penelitian ini menjelaskan terdapat upaya manajemen konflik yang dilakukan oleh UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) sebuah badan organisasi dibawah PBB yang melakukan negosiasi antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, memberikan bantuan kemanusiaan hingga dalam suatu kondisi UNFICYP menggunakan kekerasan untuk menengahi gencatan senjata antara masyarakat Siprus Yunani dan Siprus Turki. Penelitian ini juga membandingkan dengan perspektif resolusi konflik yang jelas gagal diterapkan dalam konflik Siprus. Tidak ada penyelesaian yang ditemukan melainkan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah Eropa modern. Namun, kegagalan PBB (UNFICYP) harus dilihat secara relatif dan bukan secara absolut karena terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Hasil temuan menunjukkan peran UNFICYP dalam pengelolaan konflik sangatlah penting. Meskipun tidak dapat menjamin perdamaian saat ini (yang sebenarnya

merupakan hasil dari kebuntuan dan kepuasan Turki atas apa yang telah diperolehnya), namun kehadirannya sebagai bentuk pengakuan komunitas internasional yang tidak memihak akan meningkatkan legitimasi dan menghalangi pihak-pihak yang saling memprovokasi.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan sumber data sekunder berupa informasi resmi, buku, e-book, artikel jurnal, laporan resmi dari lembaga terkait dan atau laporan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku sebagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai isu yang akan dikaji (Sarwono: 2006). Untuk mendapatkan hasil relevan, penulis menelaah data dan menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Konflik Ho-Won Jeong disini menjadi relevan dalam konteks konflik Siprus karena metodenya menawarkan pendekatan yang komprehensif terhadap suatu konflik. Teori manajemen konflik adalah seperangkat pandangan, konsep, dan prinsip yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola konflik dalam konteks organisasi atau hubungan antarindividu. Tujuan utama dari teori ini adalah mencari cara-cara efektif untuk mengelola konflik sehingga dapat diatasi atau dimanfaatkan secara konstruktif.

Konflik di Siprus, terutama konflik etnis antara komunitas Yunani dan Turki yang terjadi, memerlukan

pendekatan yang dapat memahami dinamika sosial, politik, dan budaya. Ho-Won Jeong menekankan pentingnya identifikasi akar penyebab konflik, peran pemimpin, serta kebutuhan untuk merancang solusi yang berkelanjutan. William Mallinson, dalam bukunya "*Cyprus: A Modern History*," memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah konflik di Siprus ini. Karya tersebut penulis gunakan agar dapat membantu menganalisis konteks sejarah, mengidentifikasi akar masalah, dan merinci peran berbagai pihak dalam konflik yang terjadi. Pentingnya karya Mallinson terletak pada memberikan landasan sejarah yang kuat untuk menganalisis kondisi saat ini di Siprus. Karya ini dapat diterapkan bersamaan dengan konsep manajemen konflik oleh Ho-Won Jeong, yang memberikan panduan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mengatasi masalah yang mendasari konflik.

Dengan menggabungkan pemahaman dari karya Mallinson dan pendekatan manajemen konflik Jeong, dapat dibentuk suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis, memahami, dan menerapkan manajemen konflik yang efektif terhadap konflik di Siprus. Karya ini dapat diterapkan bersamaan dengan konsep manajemen konflik oleh Ho-Won Jeong, yang memberikan panduan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mengatasi masalah yang mendasari konflik. Dengan menggabungkan pemahaman dari karya Mallinson dan pendekatan manajemen konflik Jeong, dapat dibentuk suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis, memahami, dan merancang solusi yang efektif terhadap konflik di Siprus.

Dalam buku "*Conflict Management and Resolution: An Introduction*" Ho-Won Jeong terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam menelaah manajemen konflik dalam suatu konflik yaitu identitas, kekuasaan, dan struktur.

Konflik Siprus merupakan konflik berkepanjangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Penerapan manajemen konflik Ho-Won Jeong pada konflik Siprus dapat dilihat dari tiga faktor, diantaranya:

1. Identitas

Basis identitas seperti etnis, suku, kerabat, kelas, kasta, gender, dan ras sering kali menjadi pembenaran atas ketidaksetaraan alokasi sumber daya dan penindasan politik (Jeong, 2010). Perbedaan identitas dalam masyarakat yang heterogen telah digunakan sebagai dasar untuk berbagai jenis mobilisasi kelompok. Perbedaan kelompok terkait dengan perbedaan sosial-ekonomi, perbedaan kelas, pengelompokan pekerjaan, jenis kelamin, atau budaya. Yang paling penting, sifat identitas yang bertahan lama dapat dijelaskan oleh konvergensi bahasa, etnisitas, agama, dan atribut kelompok lainnya dalam intensifikasi perasaan kebersamaan.

Pada kasus Siprus, identitas yang dimiliki oleh etnis Yunani dan Turki jelas berbeda. Identitas etnis membagi penduduk menjadi Siprus Yunani (sebagian besar beragama Kristen Ortodoks, berbahasa Yunani) dan Siprus Turki (sebagian besar beragama Islam, berbahasa Turki). Terciptanya dua nasionalisme yang saling bersaing tersebut merupakan sebuah proses panjang yang mengarah pada terbentuknya Siprus. Sejak tahun 1950-an, kebijakan "memecah belah dan memerintah" Inggris telah menyulut api, menciptakan identitas yang berbeda dari "Siprus" pada umumnya seperti "Siprus Yunani" dan "Siprus Turki".

Identitas orang Siprus Yunani telah berubah setelah mereka bergabung dengan Uni Eropa. Sejak peristiwa tersebut, jarak psikologis telah tumbuh antara warga Siprus Yunani dan Turki meskipun penghalang fisik lebih rendah. Pembentukan identitas kolektif yang terpolarisasi dan munculnya batasan simbolis antara keduanya memberikan

kontribusi besar pada terjadinya konflik yang berkepanjangan hingga saat ini.

Identitas yang telah mengakar dapat dianalisis melalui manajemen konflik yaitu dengan munculnya nasionalisme dari kedua belah pihak. Rasa untuk melindungi bangsa dan tanah air dapat menjadi kekuatan internal bagi Siprus Yunani dan Siprus Turki untuk berdamai dari konflik yang terjadi. Pengelolaan konflik tersebut selanjutnya bergantung pada tindakan Siprus menciptakan keadilan dan inklusi bagi masyarakat Siprus Yunani dan masyarakat Siprus Turki.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah unsur penting dalam memahami hubungan dan perilaku konflik serta identitas. Secara umum, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk memaksa atau membujuk pihak lain agar tunduk. Konsep kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk menyebabkan kerugian satu sama lain dalam hal ekonomi, fisik, dan psikologis ketika terdapat tindakan dan reaksi yang berlawanan.

Menganalisis hubungan antara politik dan nasionalisme di Siprus, seperti halnya dengan struktur lain dalam sejarah Siprus, tidak mungkin dilakukan tanpa referensi ekstensif terhadap kebijakan kolonial Inggris—atau bahkan sebelumnya, kebijakan penguasa Ottoman—serta perkembangan politik di Yunani dan Turki, dan dampaknya terhadap masyarakat di pulau tersebut. Posisi geostrategis Siprus yang sentral di Mediterania timur berarti bahwa selama berabad-abad pulau ini terus menjadi sasaran penaklukan. Demikian pula, dan untuk memenuhi proyek imperialisnya dan mendominasi wilayah tersebut, pemerintahan Siprus dipindahkan dari Ottoman ke Inggris pada tahun 1878.

Dalam buku *Conflict Management and Resolution*, Jeong menyebutkan bahwa dalam unsur kekuasaan, terdapat *dyadic relationship* antara Siprus Yunani dan Siprus Turki. Hubungan keduanya

dianalisis melalui persaingan jangka panjang sedari kepemimpinan Ottoman hingga kolonial Inggris yang bertahan lama dengan warisan ketidakpercayaan dan rasa sakit melibatkan hubungan dyad yang rentan konflik dalam sistem internasional. Hubungan dyad antara Siprus Turki dan Siprus Yunani telah memberikan dampak terhadap bagaimana kekuasaan di Siprus. Dominasi Yunani di Siprus salah satunya. Dengan keterikatan etnis yang sama dapat digunakan sebagai pihak ketiga untuk mencapai kepentingan Yunani melalui dengan strategi geoekonomi dan geopolitik. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemitraan Yunani dan Siprus yang sudah terjalin sejak lama, menyebabkan keduanya saling ketergantungan satu sama lain tak terhindarkan.

Konflik Siprus tidak hanya berpengaruh pada Yunani maupun Turki, namun juga telah menempatkan Siprus sebagai pos pementasan AS di Timur Tengah, dan oleh karena itu sebagai bagian dari poros strategis AS-Israel-Turki, juga harus dipertimbangkan dalam pengaturan apa pun. Keterlibatan kekuatan internasional (selain Yunani dan Turki) telah membuka celah bagaimana pengelolaan konflik melalui manajemen konflik dapat dilakukan dalam konflik Siprus. Hal ini mendasari bagaimana selanjutnya Siprus dapat menemukan penyelesaian untuk mencapai perdamaian semu atau terhindar dari konflik langsung.

3. Struktur

Dalam tradisi Hobbes, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang agresif, dan dengan demikian kontrol perilaku menjadi perhatian utama dari mekanisme manajemen konflik. Namun, beragam masalah struktural perlu dipahami dalam pemeriksaan terhadap keseluruhan kondisi perilaku kelompok dan proses sosial yang relevan dengan manusia.

Jalur konflik berskala besar sangat dipengaruhi oleh struktur hubungan antara kelompok-kelompok

yang berlawanan (misalnya simetris versus asimetris) dan bagaimana pihak-pihak yang berbeda menafsirkan struktur ini (menguntungkan atau merugikan). Sifat struktural hubungan tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan koersif dan material masing-masing pihak serta budaya nilai masing-masing. Tingkat persaingan yang saling bermusuhan di bidang ekonomi, sosial dan budaya menunjukkan kualitas hubungan secara keseluruhan.

Di negara bikomunal, komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki merupakan sebuah mitra pendiri, meskipun komunitas Siprus Turki pada kenyataannya terlalu banyak terwakili dalam berbagai struktur dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Warga Siprus Yunani, yang mencakup hampir 80% populasi pulau tersebut, sebagai contoh, hanya mendapat 70% jabatan di pemerintahan maupun pegawai negeri. Wakil presiden, yang berdasarkan konstitusi adalah warga Siprus Turki, memiliki hak veto atas keputusan kebijakan. Yunani, Türkiye dan Inggris berjanji untuk menjamin status quo baru ini. Namun, kelompok garis keras dalam komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki, yang masing-masing masih menginginkan *enosis* dan *taksim*, tidak puas dengan pengaturan tersebut.

Pada saat perjanjian tahun 1960, struktur sosial nasionalistik di kedua sisi perpecahan begitu kuat secara psikologis mengakar secara psikologis. Konflik Siprus mengarah pada kondisi struktural politik yang membagi dua wilayah kekuasaan, dalam buku *The Political Museum: Power, Conflict and Identity in Cyprus* dijelaskan bahwa setelah kemerdekaan pada tahun 1960, konflik antar-komunal yang pahit antara Siprus Yunani dan Turki tak terhindarkan dan akhirnya pendudukan militer Turki pada tahun 1974 (menurut pihak berwenang Siprus Yunani) atau intervensi (menurut pihak berwenang Siprus Turki) telah membuat Siprus terpecah menjadi dua

bagian yaitu Siprus Turki di bagian utara pulau dan Siprus Yunani di bagian selatan dengan perbedaan otoritas.

Konflik ini cukup penting karena sengketa kedaulatan yang terjadi antara Siprus Yunani dan Siprus Turki telah membuat Siprus Turki terisolasi di bagian utara pulau tersebut, yang pada akhirnya juga ikut menghambat pembangunan (termasuk deposit hidrokarbon lepas pantai), menghambat upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang seharusnya menjadi perhatian bersama, dan semakin meningkatkan perselisihan di wilayah yang semakin termiliterisasi.

Kompleksitas struktur negara Siprus memiliki pengaruh terhadap manajemen konflik yang dapat diterapkan yaitu perbedaan tersebut mengarah pada Siprus Turki dan Siprus Yunani terikat dalam mengelola negara, pengelolaan sumber daya alam misalnya. Keduanya akan terlibat penuh dalam pengelolaan sumber daya yang mengakibatkan adanya interaksi intens, pada saat inilah keamanan kolektif terjadi dimana konflik langsung dapat dihindari berubah menjadi kerjasama yang saling menguntungkan bagi Siprus sendiri.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik di Siprus antara etnis Yunani dan Turki memiliki akar yang kompleks dan dalam. Faktor identitas dan kekuasaan memainkan peran penting dalam eskalasi konflik tersebut. Sejarah kolonialisme Inggris dan Ottoman juga turut memengaruhi dinamika politik dan nasionalisme di Siprus, yang kemudian berdampak pada struktur politik dan manajemen konflik di pulau tersebut. Upaya penyelesaian konflik di Siprus telah dilakukan sejak lama, namun masih dihadapi dengan berbagai hambatan. Meskipun terdapat usaha reunifikasi dan pembangunan kepercayaan antara kedua komunitas, pembentukan "Republik

Turki Siprus Utara" pada tahun 1983 menjadi salah satu rintangan utama dalam proses perdamaian.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong dialog dan negosiasi antara Siprus Yunani dan Siprus Turki untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Peran NGO dan PBB juga perlu diperkuat dalam mendukung upaya penyelesaian konflik di Siprus. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah, politik, dan dinamika konflik di Siprus, diharapkan dapat dirancang strategi manajemen konflik yang efektif dan berkelanjutan untuk mencapai perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Jeong, H.-W. (2010). *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Taylor & Francis.
- Crisis Group. (2023, April 17). *An Island Divided: Next Steps for Troubled Cyprus*. Crisis Group. Retrieved March 18, 2024, from <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/cyprus/268-island-divided-next-steps-troubled-cyprus>
- Dodd, C. (2010). *The History and Politics of the Cyprus Conflict*. Palgrave Macmillan UK.
- Jeong, H.-W. (2010). *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Taylor & Francis.
- Ker-Lindsay, J. (2011). *The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press, USA.
- Mallinson, B., & Mallinson, W. (2005). *Cyprus: a modern history*. Bloomsbury Academic.
- Oxford University Press. (2018). Oxford Bibliographies. Retrieved March 18, 2024, from <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0240.xml>
- Putri, D. K. (2014). Analisis Intervensi

- Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus. *jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 3(3), 957-976.
- Stylianou-Lambert, T., & Bounia, A. (2016). *The Political Museum: Power, Conflict, and Identity in Cyprus*. Taylor & Francis Group.